

**PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFOMASI DAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN DENGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA SEBAGAI
VARIABEL MODERASI (Survei Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota
Palu)**

Muhammad Ilham Pakawaru¹

Akuntansi, Universitas Tadulako, Palu

pakawaruilham@untad.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the effect of using information technology and the government's internal control system on the quality of the Palu City OPD financial reports with the competence of human resources as a moderator. The population in this study is the OPD Palu City. The sampling technique uses saturation sampling with an analytical tool in managing data using WarpPLS. The results showed that the use of information technology and the government's internal control system had a positive and significant effect on the quality of financial reports, the competence of human resources was able to moderate the relationship between the government's internal control system and the quality of financial reports, but competence of human resources was not able to moderate the relationship between the use of information technology and quality financial statements.

Keywords: *Utilization of Information Technology, Government Internal Control Systems, Quality of Financial Reports, Competence of Human Resources.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan OPD Kota Palu dengan kompetensi sumber daya manusia sebagai pemoderasi. Populasi dalam penelitian ini adalah OPD Kota Palu. Teknik sampel menggunakan metode sampel jenuh (sensus) dengan alat analisis dalam mengolah data menggunakan WarpPLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, kompetensi sumber daya manusia mampu memoderasi hubungan antara sistem pengendalian intern pemerintah dan kualitas laporan keuangan, namun kompetensi sumber daya manusia tidak mampu memoderasi hubungan antara pemanfaatan teknologi informasi dan kualitas laporan keuangan.

Kata kunci : Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kualitas Laporan Keuangan, Kompetensi Sumber Daya Manusia.

Jurnal Akun Nabelo:
Jurnal Akuntansi Netral, Akuntabel, Objektif
Volume 6/Nomor 2/Januari 2024
doi:10.11594/untad.jan.6.1.20607
Jurusan Akuntansi FEB Universitas Tadulako



A. PENDAHULUAN

Akuntansi sektor publik sedang mengalami pertumbuhan yang pesat. Terdapat dukungan publik yang signifikan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas terhadap organisasi sektor publik. Seperti yang tertera pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, cara yang paling efektif untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan negara adalah dengan memberikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD dengan menyediakan Laporan Keuangan. Masyarakat mengharapkan agar Pemerintah mampu menciptakan laporan keuangan yang berkualitas tinggi. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, informasi yang terkandung dalam suatu laporan keuangan harus memenuhi kriteria kualitatif tertentu, yaitu relevan, dapat diandalkan, dapat dibandingkan, dan mudah untuk dimengerti. Untuk tujuan perencanaan, pengendalian, dan penjabaran keputusan yang diperlukan, pemerintah harus memeriksa dengan teliti informasi yang terkandung dalam laporan keuangan.

Kualitas laporan keuangan pemerintah dinilai dengan opini-opini berupa Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW) dan Tidak Menyatakan Pendapat oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di tiap provinsi. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan pemerintah Kota Palu tahun 2021. Namun, BPK masih menemukan beberapa permasalahan terkait pengelolaan keuangan daerah, meliputi pengelolaan yang tidak sesuai dengan peraturan daerah, pendapatan dan realisasi belanja.

Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi acuan bagi pemerintah Kota Palu untuk lebih meningkatkan kinerja instansi pemerintah daerahnya. Salah satu faktor yang memengaruhi peningkatan kinerja sebuah instansi pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan adalah pemanfaatan teknologi informasi. Teknologi informasi, yang mencakup teknologi komputer dan teknologi komunikasi, membawa sejumlah manfaat signifikan dalam pengelolaan keuangan. Manfaat tersebut termasuk percepatan pemrosesan data dan transaksi, penyusunan laporan yang lebih tepat waktu, kemampuan penyimpanan data dalam jumlah besar, pengurangan potensi kesalahan sehingga meningkatkan akurasi perhitungan, dan pengurangan biaya pemrosesan. Meskipun terdapat banyak keuntungan dari pemanfaatan teknologi informasi, perlu diingat bahwa mengimplementasikan teknologi informasi tidak selalu mudah. Paling utama jika teknologi informasi yang ada belum dimanfaatkan secara maksimal, maka risiko sia-sia dan peningkatan biaya yang tidak diinginkan dapat terjadi. Dalam konteks ini, pemerintah, baik pusat maupun daerah, telah mengembangkan aplikasi komputer seperti Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Aplikasi ini dirancang guna mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang diharapkan lebih adaptif, responsif, inovatif, dan akuntabel. Pengembangan SIPD didukung oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, yang memandang aplikasi ini sebagai sarana untuk mempermudah perencanaan pembangunan dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah (Karundeng dkk, 2021).

Faktor kedua yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap pengelolaan laporan keuangan adalah sistem pengendalian internal pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengatur bahwa pengendalian intern dilakukan untuk memastikan bahwa semua transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan undang-undang, untuk memastikan bahwa semua transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan standar akuntabilitas pemerintah, untuk memverifikasi bahwa semua transaksi keuangan adalah benar serta dibuat sesuai dengan persyaratan undang-undang, dan untuk memberikan informasi

penting mengenai penggunaan aset yang berdampak material dalam laporan keuangan (Sari & Priyadi, 2020).

Penting untuk diingat bahwa pengelolaan keuangan daerah yang baik dan berkualitas sangat bergantung pada peran sumber daya manusia. Laporan keuangan adalah produk dari disiplin ilmu akuntansi, maka untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas, diperlukan individu yang memiliki kompetensi dalam bidang ini. Warisono menjelaskan bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten, memiliki pendidikan akuntansi yang memadai, berpartisipasi dalam pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, serta memiliki pengalaman dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik. Semua ini penting untuk menggunakan sistem akuntansi yang ada dengan benar. Kegagalan aparat pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan konsep akuntansi dapat mengakibatkan kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Sambuaga dkk, 2020). Memiliki pemahaman yang tepat akan memungkinkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) diimplementasikan secara konsisten dan sesuai dengan aturan. Sumber daya manusia yang memahami SPIP dengan baik akan memberikan hasil yang optimal (Setiawan & Tami, 2018).

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah daerah seharusnya memiliki kemampuan untuk menguasai teknologi informasi, sehingga data yang diolah dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi para penggunanya. Sumber daya manusia yang kompeten dalam mengelola data memiliki potensi untuk meningkatkan kecepatan dan akurasi dalam penyusunan laporan keuangan daerah (Taviana & Riharjo, 2020). Sebagaimana diungkapkan oleh Mau, dkk (2023), salah satu hambatan umum dalam pemanfaatan teknologi informasi adalah kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi yang memadai untuk mengelola teknologi informasi dalam konteks keuangan daerah. Pengembangan teknologi informasi untuk mengelola keuangan daerah harus didukung oleh beberapa faktor, termasuk sumber daya manusia yang kompeten, perangkat lunak dan perangkat keras yang memadai, serta kebijakan atau regulasi yang mendukung unit-unit kerja dalam melaksanakan tugas pengelolaan keuangan daerah secara digital. Semua ini bersama-sama membentuk ekosistem yang memungkinkan penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih efektif dan efisien.

B. TINJAUAN PUSTAKA

B.1 Stewardship Teory

Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Donaldson dan Davis pada tahun 1991, dan memaparkan konsep di mana para manajer cenderung tidak hanya terfokus pada tujuan-tujuan individu mereka, melainkan lebih berorientasi pada pencapaian hasil yang menguntungkan organisasi secara keseluruhan. Teori Stewardship mengemukakan bahwa ada hubungan yang kuat antara kepuasan individu dan kesuksesan organisasi secara keseluruhan. Kesuksesan organisasi, dalam pandangan teori ini, mencerminkan pencapaian maksimal utilitas atau manfaat bagi seluruh kelompok dalam organisasi, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat maksimal bagi individu-individu yang ada dalam kelompok tersebut. Dasar dari Teori Stewardship adalah keyakinan bahwa manusia pada dasarnya memiliki sifat-sifat positif, seperti tanggung jawab, kepercayaan, integritas, dan kejujuran. Teori ini juga mengandalkan asas kepercayaan terhadap pihak yang diberi wewenang, sehingga manajemen dalam suatu organisasi dianggap sebagai "good steward" yang menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab atas nama organisasi dan pemangku kepentingan lainnya (Fauziyah, 2019).

Teori ini sejalan dengan hubungan antara pemerintah dan masyarakat, dimana pemerintah sebagai steward memiliki tanggung jawab untuk mengelola organisasi (pemerintahan) untuk mencapai tujuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Untuk melakukan tanggung jawab tersebut maka steward (pembuat laporan keuangan) akan memaksimalkan kompetensi dalam penyelesaian tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan organisasi. Selain itu, untuk meningkatkan kompetensi, sumber daya manusia akan mengefektifkan sistem pengendalian intern dan memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi.

B.2. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Bastian (2006) mengemukakan bahwa laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting dalam menggambarkan posisi keuangan suatu entitas dan mencatat transaksi-transaksi yang dilakukan olehnya. Tujuan dari pelaporan keuangan adalah untuk membantu para pengguna informasi keuangan dalam membuat dan mengevaluasi keputusan yang berhubungan dengan aktivitas mereka, sehingga mereka dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menguraikan komponen laporan keuangan yang harus disusun oleh pemerintah daerah. Komponen-komponen tersebut meliputi laporan realisasi anggaran (LRA), laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (CaLK).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, menjelaskan bahwa laporan keuangan memiliki empat karakteristik kualitatif dalam penyusunannya, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Dengan memastikan laporan keuangan memenuhi karakteristik-karakteristik ini, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa informasi keuangan yang disajikan benar-benar bermanfaat bagi pengambilan keputusan yang lebih baik dalam pengelolaan keuangan dan pencapaian tujuan mereka.

B.3. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, informasi keuangan daerah menggarisbawahi pentingnya pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mencapai tata pemerintahan yang baik atau Good Governance. Pemerintah memiliki kewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi agar dapat meningkatkan pengelolaan keuangan dan menyediakan informasi kepada pelayanan publik. Dalam konteks ini, pemanfaatan teknologi informasi tidak hanya memberikan dampak pada pengelolaan data dan informasi untuk pengambilan keputusan yang lebih efisien, tetapi juga membentuk struktur dan fungsi yang mendukung tujuan organisasi secara keseluruhan. Zamzami, dkk (2016) Penggunaan teknologi informasi dapat merangsang perubahan dalam operasional organisasi, termasuk dalam hal peningkatan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini juga memungkinkan organisasi untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungan yang dinamis. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi informasi bukan hanya tentang efisiensi internal, tetapi juga tentang kemampuan organisasi untuk mencapai tujuannya secara lebih efektif dan memberikan pelayanan publik yang lebih baik.

B.4 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sangat informatif. Peraturan ini membahas pentingnya Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam konteks pemerintah pusat dan pemerintah daerah. SPIP adalah sebuah proses integral yang menjadi bagian

dari aktivitas dan tindakan yang dilakukan secara berkelanjutan oleh pemimpin dan seluruh pegawai pemerintah. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan organisasi tercapai dengan cara yang efektif dan efisien, meliputi efektivitas dan efisiensi dalam tujuan operasional pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta kepatuhan terhadap peraturan dan hukum. Elemen-elemen utama dari SPIP mencakup lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Penerapan SPIP sangat penting dalam konteks pemerintahan karena membantu dalam mencapai efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan serta kepatuhan terhadap peraturan.

B.5 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Menurut Sutrisno (2009) peran sumber daya manusia dalam organisasi dan pentingnya kompetensi dalam konteks instansi pemerintah sangat relevan. Sumber daya manusia memainkan peran yang sangat penting dalam menjalankan organisasi, mengambil keputusan, dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemampuan dan kinerja sumber daya manusia dalam menganalisis masalah yang terjadi dalam lingkup kerja dan tanggung jawab mereka sangat memengaruhi kualitas keputusan yang diambil. Dalam konteks instansi pemerintah, yang memiliki tanggung jawab besar terhadap pengelolaan keuangan dan penyediaan pelayanan publik, kompetensi pegawai, terutama dalam bidang keuangan, sangat penting. Pegawai yang memiliki pemahaman yang baik tentang logika akuntansi dan mampu menerapkan sistem akuntansi yang ada dapat membantu memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan akurat dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Standar kompetensi, seperti yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013, memainkan peran penting dalam memastikan bahwa pegawai memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan tugas dan jabatan mereka. Ini membantu memastikan bahwa sumber daya manusia di pemerintah daerah memiliki kemampuan yang diperlukan untuk menjalankan tugas mereka dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia dalam memahami dan menerapkan konsep akuntansi dapat berdampak serius pada akurasi dan kualitas laporan keuangan, yang pada gilirannya dapat mengganggu efisiensi dan efektivitas operasional pemerintah daerah. Oleh karena itu, investasi dalam pengembangan kompetensi pegawai dalam bidang keuangan merupakan langkah yang sangat penting dalam mencapai tujuan organisasi dan memastikan akuntabilitas yang baik dalam pengelolaan keuangan.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah bentuk penelitian survei. Menurut Kerlinger (dalam Sugiyono, 2013:12), Penelitian survei adalah jenis penelitian yang dilakukan terhadap populasi besar atau kecil, namun data yang dianalisis adalah data yang berasal dari sampel yang diambil dari populasi tersebut untuk memahami hubungan antar variabel dalam sosiologi atau psikologi.

Pada penelitian ini teknik analisis yang digunakan adalah Partial Least Square (PLS) dengan penggunaan software WarpPLS. PLS adalah model persamaan Structural Equation Modeling (SEM) yang berbasis komponen atau varian (variance).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

D.1 Pengujian Reliabilitas

Nilai composite reliability dan cronbach's alpha yang dihasilkan berdasarkan hasil pengujian data disajikan pada table berikut:

Tabel 3 Nilai *Composite Reliability* dan *Cronbach's Alpha*

<i>Latent Variabel</i>	<i>Composite Reliability</i>	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>Keterangan</i>
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,915	0,896	Reliabel
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	0,972	0,970	Reliabel
Kualitas Laporan Keuangan	0,955	0,950	Reliabel
Kompetensi Sumber Daya Manusia	0,931	0,920	Reliabel

Sumber: Output WarpPLS, 2023

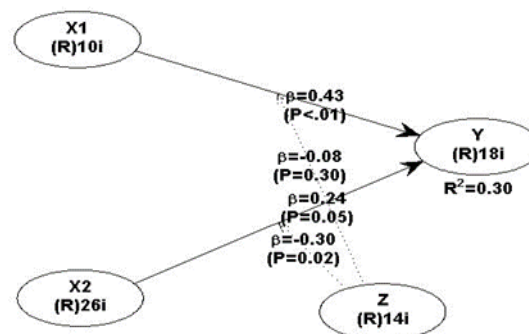
Berdasarkan hasil yang disajikan pada table, diketahui bahwa setiap variabel mempunyai reliabilitas komposit dan nilai cronbach's alpha lebih dari $> 0,70$. Hasilnya, dapat disimpulkan bahwa setiap kuesioner dalam penelitian ini telah reliabel.

D.2 Pengujian Validitas

Berdasarkan hasil, setiap variabel telah memenuhi kriteria validitas konvergen pada outer model, yaitu memiliki loading factor diantara $> 0,70$ atau $> 0,50$ dan AVE yang dimiliki $> 0,50$ pada setiap variabel. Maka berdasarkan hasil tersebut memberikan kesimpulan bahwa variabel telah memberikan validitas konvergen yang baik.

Setiap indikator yang digunakan pada penelitian ini mempunyai koefisien cross loading lebih besar dibandingkan dengan nilai korelasi indikator tersebut dengan indikator pada variabel lainnya, hal ini menunjukkan bahwa setiap indikator yang digunakan dalam penelitian ini mempunyai validitas diskriminan yang baik.

Pengujian Model Struktural (Inner Model)



Gambar 2 Jalur Penelitian

Gambar yang dihasilkan memberikan penjelasan bahwa model penelitian ini empiris dengan signifikan dimana p-value yang dihasilkan $< 0,05$. Berikut ini dapat dijelaskan nilai koefisien dan p-value yang dihasilkan berdasarkan pengelolaan data:

Tabel 4 Nilai Koefisien dan p-value

	Nilai Koefisien	P-value	Kesimpulan
X1	0,434	$<0,001$	Signifikan
X2	0,240	0,048	Signifikan
Z*X1	-0,079	0,302	Tidak Signifikan
Z*X2	-0,304	0,016	Signifikan

Sumber: Output WarpPLS, 2023

Telah dilakukan hasil pengujian untuk menguji beberapa indikator model fit yang lain seperti: Average path coefficient (APC), Average R-squared (ARS), Average adjusted R-squared (AARS), Average block VIF (AVIF), dan Average full collinearity VIF (AFVIF) pada tabel berikut ini.

Tabel 5 Indikator Model Fit

Parameter	Nilai	Batasan	Kesimpulan
Average path coefficient (APC)	0.264 P=0,016	P<0,05	Model fit
Average R-squared (ARS)	0.297 P<0,009	P<0,05	Model fit
Average adjusted R-squared (AARS)	0.219 P<0,033	P<0,05	Model fit
Average block VIF (AVIF)	2.104	acceptable if ≤ 5 , ideally ≤ 3.3	Model fit
Average full collinearity VIF (AFVIF)	3.959	acceptable if ≤ 5 , ideally ≤ 3.3	Model fit
Tenenhaus GoF (GoF)	0.452	small ≥ 0.1 , medium ≥ 0.25 , large ≥ 0.36	Model fit

Sumber: Output WarpPLS, 2023

Berdasarkan tabel memberikan hasil bahwa APC, ARS, dan AARS guna mengukur rata-rata nilai path coefficient, R-squared dan adjusted R-squared memberikan hasil nilai APC = 0.264; ARS = 0.297; dan AARS = 0.219 dan seluruh nilai tersebut dinyatakan signifikan dengan level $<0,001$ hingga 0,033 p-value yang telah disarankan untuk APC, ARS, dan AARS sebagai model fit adalah $< 0,05$, maka dapat dikatakan bahwa kriteria goodness of fit model penelitian ini terpenuhi.

Hasil yang dikemukakan didukung berdasarkan nilai AVIF dan AFVIF sebagai indikator untuk mengetahui terjadi multikolinearitas atau tidak. Estimasi nilai AVIF dan AFVIF masing-masing adalah 2,104 dan 3,959. Nilai GoF sebesar 0,452 menunjukkan bahwa akurasi model masuk dalam kategori terbesar ($0,452 > 0,36$). Hal ini menunjukkan bahwa model penelitian empiris yang ada saat ini telah sepenuhnya memenuhi kriteria dan tidak terdapat permasalahan multikolinearitas antara indikator dan variabel eksogen.

Koefisien Determinasi

Tabel 5 *R-squared*, *Adjusted R-squared* dan *Q-squared*

	Kualitas Laporan Keuangan
<i>R-squared</i>	0,297
<i>Adjusted R-squared</i>	0,219
<i>Q-squared</i>	0,747

Sumber: Output WarpPLS, 2023

Nilai *R-squared* dari variabel kualitas laporan keuangan (KLK) adalah sebesar 0,297 mengartikan bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi (PTI), sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan moderasi kompetensi sumber daya manusia mampu mempengaruhi variabel kualitas laporan keuangan (KLK) sebesar 29,7%.

Nilai validitas prediktif pada model penelitian ini telah baik. Hal ini disebabkan karena nilai *Q-squared* kualitas laporan keuangan (KLK) sebesar 0,663 dan nilai tersebut berada di atas nilai nol.

Effect Size for Path Coefficient

Tabel 6 Nilai Effect Size

	PTI	SPIP	KSDM*PTI	KSDM*SPIP
KLK	0,343	0,182	0,019	0,209

Sumber: Output WarpPLS, 2023

D.3 Pengujian Hipotesis dan Pembahasan

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Nilai koefisien berdasarkan hasil pengujian H1 dengan nilai sebesar 0,434 dan dengan nilai *p* yang dihasilkan sebesar <0,001 signifikan pada tingkat $\alpha = 5\%$ atau < 0,05. Maka, dari hasil tersebut hipotesis pertama memberikan hasil bahwa pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan diterima dan didukung oleh bukti empiris.

Penggunaan aplikasi SIPD dapat membantu pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan serta memudahkan dalam mengolah data keuangan secara sistematis. Pencatatan transaksi secara terkomputerisasi dapat meminimalisir kesalahan dan memberikan penyimpanan data dalam jumlah besar. Penggunaan sistem informasi yang terintegrasi dapat memberikan kemudahan dalam mengolah data keuangan secara sistematis dan membaiknya suatu arus informasi dalam sebuah organisasi, sehingga laporan keuangan dapat menghasilkan informasi yang andal, terbebas dari kesalahan penyajian dan teruji kebenarannya. Pemanfaatan teknologi informasi yang maksimal akan mempengaruhi kinerja instansi pemerintah daerah untuk meningkatkan pengelolaan keuangan, sehingga memberikan kepuasan hasil dan terpenuhinya akuntabilitas pemerintah. Semakin optimal pemanfaatan teknologi informasi pemerintah daerah maka akan menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik.

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Nilai koefisien berdasarkan hasil pengujian H2 dengan nilai sebesar 0,240 dan dengan nilai p yang dihasilkan sebesar 0,048 signifikan pada tingkat $\alpha = 5\%$ atau $< 0,05$. Maka, dari hasil tersebut hipotesis pertama memberikan hasil bahwa sistem pengendalian intern pemerintah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan diterima dan didukung oleh bukti empiris.

Sistem pengendalian intern pemerintah yang diterapkan di OPD Kota Palu dilakukan secara efektif dan efisien oleh pimpinan dan pegawai yang bersangkutan sesuai dengan perencanaan dan pengendalian yang ada. Penerapan sistem pengendalian intern pemerintah yang efektif di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Palu adalah langkah yang sangat penting dalam mencapai tujuan organisasi dan memastikan akuntabilitas yang baik dalam pengelolaan sumber daya ekonomi. Sistem pengendalian intern yang baik membantu memastikan bahwa pelaporan keuangan dilakukan dengan integritas dan akurasi. Ini sangat penting dalam konteks pengelolaan keuangan pemerintah dan memenuhi persyaratan transparansi. Penerapan SPIP yang efektif adalah langkah yang positif untuk mendukung pengelolaan keuangan yang baik dan menciptakan laporan keuangan yang berkualitas. Ini juga berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi pemerintah dan meningkatkan transparansi dalam pelayanan publik.

Kompetensi Sumber Daya Manusia Memoderasi Pengaruh Antara Pemanfaatan Teknologi Informasi Dengan Kualitas Laporan Keuangan

Nilai koefisien berdasarkan hasil pengujian H3 dengan nilai sebesar -0,079 dan dengan nilai p yang dihasilkan sebesar 0,302 signifikan pada tingkat $\alpha = 5\%$ atau $< 0,05$. Maka, dari hasil tersebut hipotesis pertama memberikan hasil bahwa kompetensi sumber daya manusia mampu memoderasi pengaruh antara pemanfaatan teknologi informasi dengan kualitas laporan keuangan ditolak.

Memadai dalam pemanfaatan teknologi informasi dan keahlian sumber daya manusia dalam mengoperasikannya adalah dua elemen yang saling mendukung dalam memastikan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Meskipun kompetensi sumber daya manusia sangat penting, sinergi antara teknologi informasi yang memadai dan keahlian sumber daya manusia adalah kunci keberhasilan. Pemahaman tentang cara mengoptimalkan teknologi informasi untuk tujuan akuntansi dan pelaporan adalah aspek kunci. Kompetensi sumber daya manusia ini tidak mampu memperkuat pengelolaan laporan keuangan. Pelatihan dan pengalaman yang masih kurang menjadi kendala dalam memahami pekerjaan yang ada.

Kompetensi Sumber Daya Manusia Memoderasi Pengaruh Antara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dengan Kualitas Laporan Keuangan

Nilai koefisien berdasarkan hasil pengujian H4 dengan nilai sebesar -0,304 dan dengan nilai p yang dihasilkan sebesar 0,016 signifikan pada tingkat $\alpha = 5\%$ atau $< 0,05$. Maka, dari hasil tersebut hipotesis pertama memberikan hasil bahwa kompetensi sumber daya manusia mampu memoderasi pengaruh antara sistem pengendalian intern pemerintah dengan kualitas laporan keuangan diterima dan didukung oleh bukti empiris.

Pemahaman yang baik akan SPIP adalah faktor kunci dalam memastikan bahwa SPIP dapat diimplementasikan dengan konsisten dan sesuai aturan, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Tingkat kompetensi dan pengetahuan sumber daya manusia sangat memengaruhi pemahaman dan implementasi SPIP. Semakin baik kompetensi dan pengetahuan sumber daya manusia, semakin efektif mereka dalam menerapkan SPIP dalam setiap tahap penyusunan laporan keuangan.

E. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka simpulan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kota Palu telah memanfaatkan teknologi informasi dengan optimal sehingga memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, Pemerintah Kota Palu telah mengimplementasikan sistem pengendalian intern pemerintah dengan baik sehingga memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, dan Kompetensi sumber daya manusia pada OPD Kota Palu belum memenuhi kompetensi yang baik dalam hal keahlian pemanfaatan teknologi informasi sehingga kompetensi sumber daya manusia tidak mampu memoderasi hubungan antara pemanfaatan teknologi informasi dengan kualitas laporan keuangan, serta Kompetensi sumber daya manusia pada OPD Kota Palu telah memiliki pemahaman dan didukung latar belakang pendidikan yang tepat serta SPIP diimplementasikan secara konsisten dan sesuai aturan, maka kompetensi sumber daya manusia mampu memoderasi hubungan antara sistem pengendalian intern pemerintah dengan kualitas laporan keuangan

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiawan, N. T., & Rasmini, N. K. (2016). Pengaruh Sistem Berbasis Akrua, TI, dan SPIP Pada Kualitas Laporan Keuangan Dengan Kompetensi SDM Sebagai Moderasi. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, Vol. 5 No. 10.
- Aziyah, W., & Yanto, H. (2022). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagai Variabel Moderating. *Riset & Jurnal Akuntansi*, Vol. 6 No. 1.
- Bastian, I. (2006). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar* (S. Saat & Y. Sumiharti, Ed.). Penerbit Erlangga.
- Fauziyah, E. M. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Aparatur Pemerintah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderasi (Pada Organisasi Perangkat Daerah di Kota Serang). *Jurnal Riset Akuntansi*, Vol. 04 No. 02, 196–209.
- Ghozali, I., & Latan, H. (2017). *Partial Least Square, Konsep Metode dan Aplikasi Menggunakan WarpPLS 5.0*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Indrayani, K. D. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten). *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, Vol. 4 No. 1, 1–16.
- Karundeng, A. B., Kaawoan, J. E., & Pangemanan, S. E. (2021). Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) Di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. *Jurnal Governance*, Vol. 1 No. 2.
- Mau, C. L., Sonbay, Y. Y., Bibiana, R. P., Perseveranda, M. E., Manafe, H. A., & Man, S. (2023). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengawasan Keuangan Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belu. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, Vol. 4 No. 1.

- Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Sari, D. I., & Priyadi, M. P. (2020). Determinan yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: SPI Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 9 No. 2.
- Sambuaga, F. R., Siahay, A. Z. D., & Falah, S. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Pemerintahan Kabupaten Keerom). *Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah*, Vol. 5 No. 1.
- Setiawan, A. B., & Tami, R. P. (2018). Pengaruh Penerapan SAP dan SPIP Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Dengan Kompetensi SDM Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal AKUNIDA*, Vol. 4 No. 1, 76–89.
- Sutrisno, E. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Edisi Pertama). Kencana Prenada Media.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta.
- Supangat, A. (2010). *Statistik Dalam Kajian Deskriptif, Inferensi, dan Nonparametrik*. Kencana prenada media group.
- Sholihin, M., & Ratmono, D. (2013). *Analisis SEM-PLS dengan WarpPls 3.0*. Penerbit Andi.
- Taviana, T., & Riharjo, I. B. (2020). Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Faktor Pemoderasi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 9 No. 1.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Zamzami, F., Nusa, N. D., & Faiz, I. A. (2016). *Sistem Informasi Akuntansi*. Gadjah Mada University Press.